

**KAJIAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA APSCO
DITINJAU DARI ASPEK POLITIK**

Totok Sudjatmiko

*Peneliti Muda Bidang Pengkajian Kedirgantaraan Internasional
Pusat Analisis dan Informasi Kedirgantaraan, LAPAN*

ABSTRACT

Indonesia membership to international organization is a part of struggle to pursuit national interest. Related with APSCO establishment as a space cooperation organization which has multilateral characteristic, Indonesia be able to pursuit national interest with build relation with regional as a whole. Regulation of Indonesia international organization membership has benefit requirement. One of them is political benefit. This paper is write down with considering APSCO as multilateral cooperation and try to answer benefit to Indonesia membership of APSCO from political aspect.

ABSTRAK

Keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional merupakan bagian dari perjuangan mengejar kepentingan nasional. Dikaitkan dengan pembentukan APSCO sebagai organisasi kerjasama keantariksaan yang bersifat multilateral, Indonesia dapat mengejar kepentingan nasional dengan membangun hubungan dengan kawasan secara keseluruhan. Aturan tentang keanggotaan dan keikutsertaan Indonesia di organisasi internasional mensyaratkan beberapa manfaat yang perlu dipenuhi. Salah satu manfaat itu adalah manfaat di bidang politik. Makalah ini disusun dengan mempertimbangkan APSCO sebagai kerjasama multilateral dan berusaha menjawab manfaat keanggotaan Indonesia pada APSCO dilihat dari aspek politik.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Politik luar negeri Indonesia selain dipengaruhi kondisi domestik juga sangat dipengaruhi oleh dinamika regional dan internasional. Dinamika kawasan Asia-Pasifik menjadi perhatian penting bagi Indonesia sebagai negara besar di Asia-Tenggara. Di kawasan Asia-Pasifik aktor negara yang muncul sebagai kekuatan baru yang berpengaruh adalah China. Hal ini dikarenakan kepemilikan kemampuan teknologi antariksa China yang semakin kuat menjadi pelengkap kekuatan pertahanan militer yang paripurna.

Upaya China lainnya untuk meningkatkan kekuatannya di kawasan Asia Pasifik adalah dengan membentuk organisasi kerja sama keantariksaan. Upaya untuk membentuk organisasi kerja sama keantariksaan di kawasan Asia Pasifik tersebut telah dimulai China pada tahun 1992 bersama-sama dengan Pakistan dan Thailand. Kemudian pada tahun 2005 China berhasil mewujudkan keinginannya tersebut dengan ditandatangani Konvensi pembentukan organisasi kerja sama keantariksaan yaitu *The Asia-Pacific Space Cooperation Organization-APSCO* oleh delapan negara Asia-Pasifik. Kedelapan negara tersebut adalah Bangladesh, China, Indonesia, Iran, Mongolia, Pakistan, Peru, dan Thailand. Saat ini menjadi sembilan negara setelah pada tanggal 1 Juni 2006 Turki menandatangani Konvensi pembentukan APSCO tersebut.

Namun demikian dengan ditandatanganinya konvensi ini tidak serta merta telah mengikat Indonesia dalam keanggotaannya, karena dalam proses keanggotaan sebagaimana diatur dalam konvensi APSCO Bab 11 Pasal 28 ayat 2 yang mengharuskan untuk melakukan ratifikasi sebelum mendapatkan hak suara penuh. Sampai saat ini tujuh negara telah meratifikasi Konvensi APSCO, dan dua negara lainnya yaitu Turki dan Indonesia belum meratifikasi.

Berdasarkan Pasal 3 Keputusan Presiden No. 64 Tahun 1999 tentang Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah Republik Indonesia pada Organisasi-organisasi Internasional, penentuan keanggotaan Indonesia dalam suatu organisasi internasional perlu mempertimbangkan banyak hal antara lain manfaat dari organisasi internasional tersebut yang ditinjau dari berbagai aspek. Dengan demikian keanggotaan Indonesia pada APSCO yaitu dengan meratifikasi Konvensi APSCO tentunya juga harus didasarkan pada manfaat yang diperoleh bagi pembangunan keantariksaan nasional.

Salah satu manfaat yang menjadi fokus kajian dalam tulisan ini adalah manfaat politik, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 butir b, yakni untuk menunjang pelaksanaan kebijakan politik dan hubungan luar negeri yang diabdikan untuk kepentingan nasional, terutama untuk kepentingan pembangunan di segala bidang.

1.2. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, terdapat beberapa hal menarik yang dapat dikaji. Namun demikian yang menjadi fokus perhatian dalam tulisan ini adalah bagaimana manfaat keanggotaan Indonesia pada APSCO dari aspek politik.

1.3. Maksud dan Tujuan

Makalah ini disusun dengan maksud untuk memberikan uraian perlunya pertimbangan dari aspek politik terhadap manfaat keanggotaan Indonesia pada organisasi APSCO yang digagas oleh China. Sedangkan tujuannya diharapkan dapat dijadikan bahan masukan atau kajian lebih lanjut dalam keanggotaan Indonesia dalam organisasi tersebut.

1.4. Metodologi

Dalam penulisan makalah ini metodologi yang digunakan adalah deskripsi analisis. Untuk data dan informasi yang akan dianalisa diperoleh dari studi literatur, internet, jurnal dan artikel. Sebagai alat untuk menganalisisnya digunakan Teori dan Konsep tentang politik luar negeri. Politik luar negeri secara umum dapat didefinisikan sebagai seperangkat formula nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan dunia internasional. Kemudian konsep yang melekat dengan teori ini adalah kepentingan nasional, dimana konsep kepentingan nasional akan dapat digunakan untuk memahami perilaku internasional dan menjelaskan perilaku luar negeri suatu Negara.

2. POLITIK LUAR NEGERI

Politik luar negeri Indonesia dapat didekati dengan dua pendekatan ; *pertama*, pendekatan akademis atau *International Relations School of thought* yang dinyatakan oleh Cecil V. Crabb bahwa dilihat dari unsur fundamentalnya, politik luar negeri itu terdiri dari dua elemen, yaitu tujuan nasional yang akan dicapai dan alat-alat untuk mencapainya. Interaksi antara tujuan nasional dan sumber-sumber untuk mencapainya merupakan subjek kenegaraan yang abadi. Dalam unsur-unsurnya itu terdapat politik luar negeri semua Negara, besar atau kecil, semuanya sama. Kemudian keputusan yang dihasilkan oleh politik luar negeri dikategorikan dalam tiga katagori utama, yaitu : (1) bersifat pragmatis, (2) bersifat krisis, dan (3) bersifat taktis; *kedua*, pendekatan praktis yang digunakan oleh Indonesia, dimana definisi politik luar negeri dinyatakan didalam Bab I Pasal 1 ayat 2 / UU No. 37 Tahun 1999 adalah bahwa Politik Luar Negeri adalah kebijakan, sikap, dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional.

Dari sisi geostrategi, Politik Luar Negeri Indonesia juga dipengaruhi oleh kondisi eksternal kawasan khususnya Asia Pasifik. Kondisi eksternal yang harus dihadapi oleh Indonesia adalah *Pertama*, bahwa kondisi ekonomi dan politik dunia masih dibawah bayang-bayang Amerika Serikat (AS). Sebagai konsekuensinya adalah sistem internasional masih kuat dipegang oleh AS. Hal ini semakin jelas ketika kawasan Asia Pasifik dan Asia Tenggara menjadi kawasan yang strategis bagi keberadaan AS. *Kedua*, terkait dengan hegemoni AS dalam sistem internasional, bergulirnya gelombang globalisasi yang massive sebagai perwujudan dari terbukannya akses untuk persaingan, maka posisi China harus dipertimbangkan dan diperhitungkan dengan cukup cermat melihat kepada transformasi China yang demikian cepat menjadi *global regional* dan *global power*. Bagi Negara-negara di kawasan Asia-Pasifik perilaku China yang berupaya untuk mensejajarkan diri dengan Negara-negara besar di kawasan seperti Jepang dan India, dan negara diluar kawasan seperti AS, menjadi barometer kawasan khususnya bila melihat kepada dinamika hubungan antara China-AS yang cenderung tidak stabil mengingat banyak kepentingan China di kawasan yang bergesekan dengan AS. Dengan demikian maka China dalam mensejajarkan posisi dan kekuatannya akan cenderung ingin mengubah sistem internasional dan kawasan. *Ketiga*, munculnya persoalan Taiwan yang memicu konfrontasi antara China-AS dan manuver China di Laut China Selatan yang bersinggungan dengan negara-negara Asia Tenggara.

3. CHINA DAN APSCO

3.1. Kebijakan Keantariksaan China

China merupakan Negara yang sangat progresif dalam ilmu pengetahuan dan teknologinya, bahkan pembangunan iptek ini dijadikan oleh Beijing sebagai fundamendal transformasi negeri China untuk berkompetisi dengan Negara-negara teknologi lainnya di kawasan. Di era keantariksaan kini China mampu mentransformasikan Negaranya sebagai Negara yang memiliki kekuatan paripurna

dengan kemampuan teknologi antariksa. Keantariksaan bagi China merupakan symbol kesatuan nasional, kekuatan nasional, dan menunjukkan kapabilitas teknologi, bahkan kekuatan China di bidang ini sangat krusial dan hampir setara dengan Amerika. Ambisi China untuk setara dengan kekuatan dunia dan menjadi kan dirinya *great power* diwujudkan dengan diluncurkan untuk pertama kalinya buku putih keantariksaan pada tahun 2000 dengan judul *White Paper on Space Activities in 2000*. Dalam buku putih ini dapat dilihat beberapa kata kunci terkait dengan strategi dan kekuatan nasional China secara menyeluruh seperti *national interest*, *comprehensive development strategy* dan *comprehensive national strength*, dan dinyatakan secara jelas berikut ini:

The Chinese government has all along regarded the space industry as an integral part of the state's comprehensive development strategyThe aims and principles of China's space activities are determined by their important status and function in protecting China's national interests and implementing the state's development strategy.

Dengan diluncurkannya buku putih tahun 2000 tersebut mendorong Beijing untuk mengejar dan melakukan pencapaian-pencapaian baru, untuk itu diluncurkan lah kembali Buku Putih berikutnya pada bulan Oktober 2006 dengan judul *China's Space Activities in 2006*. Pada Buku Putih tahun 2006 ini dimuat pencapaian dalam teknologi dan aplikasi antariksa selama untuk kurun waktu lima tahun sejak dikeluarkannya Buku Putih tahun 2000, serta rencananya dalam lima tahun kedepan.

3.2. Arti Penting APSCO sebagai kerjasama multilateral bagi China

Arti penting APSCO bagi China, selain sejalan dengan dan merupakan implementasi dari prinsip-prinsip, kebijakan dasar, dan bidang kerja sama prioritas China dalam kerja sama keantariksaan internasional, juga merupakan suatu prestise politik di region Asia-Pasifik. Bila sedikit merujuk kebelakang akan dapat dilihat kompetisi China dengan India di bidang keantariksaan, kompetisi itu tercermin pada partisipasi kedua negara, seperti China yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan *Regional Space Applications Programme for Sustainable Development (RESAP)* yang diwadahi oleh ESCAP.

RESAP I, periode 1995 – 1999, adalah upaya perwujudan Deklarasi yang disepakati pada Konperensi Pertama Tingkat Menteri tentang Aplikasi Antariksa untuk Pembangunan Negara-negara di Asia Pasifik yang diselenggarakan di Beijing, 19 – 24 September 1994. Deklarasi tersebut diberi nama "*Beijing Declaration on Space Technology Applications for Environmentally Sound and Sustainable Development in Asia and the Pasific*".

Kemudian dilanjutkan dengan RESAP II, periode 2000 – 2005, sebagai kelanjutan dari RESAP I, juga telah disepakati pada Konperensi Kedua Tingkat Menteri tentang Aplikasi Antariksa untuk Pembangunan Negara-negara di Asia-Pasifik yang berlangsung di New Delhi, 15 – 20 November 1999. RESAP II yang dideklarasikan dalam "*Delhi Declaration on Space Technology Applications in Asia and the Pasific for Improved Quality of Life in the New Millennium*" memuat antara lain (i) Minimum

Common Programme dan (ii) Strategy dan Action Plan. Dalam Strategy dan Action Plan RESAP II, pembentukan regional space agency telah direkomendasikan secara eksplisit. Disini China kembali memberikan dukungan yang signifikan dalam persiapan konferensi. Bahkan China kemudian berpartisipasi dengan jumlah peserta yang cukup besar (18 peserta, di antaranya Wakil Menteri Iptek dan Wakil Administrator (NSA), jumlah peserta kedua dari negara Asia-Pasifik setelah tuan rumah India, pada Konferensi tersebut.

Terkait dengan inisiatif yang berkembang selanjutnya hal itu kemudian membentuk konstelasi di kawasan dalam kegiatan antariksa. Sebagaimana diketahui Di region Asia-Pasifik, selain RESAP juga telah muncul berbagai inisiatif regional keantariksaan lainnya, seperti *Asia-Pacific Multilateral Cooperation in Space Technology Applications* (AP-MCSTA), *Asia-Pacific Regional Space Agency Forum* (APRSAF), dan *Centre for Space Science to the Technology Education in Asia and the Pacific - Affiliated to the United Nations* (CSSTEAP). AP-MCSTA (dimotori oleh China) didirikan pada Pebruari 1992 berdasarkan MOU yang ditandatangani oleh menteri/kepala badan antariksa dari China (CNSA), Pakistan (SUPARCO), dan Thailand (Menteri Transportasi dan Komunikasi). APRSAF diprakarsai oleh Jepang pada tahun 1993. Sedangkan CSSTEAP yang berkedudukan di Dehra Dun (India) didirikan pada 1 November 1995 oleh 10 (sepuluh) Negara di Asia-Pasifik, salah satunya Indonesia, di mana China hingga saat ini belum menjadi anggota CSSTEAP dan China sama sekali tidak pernah berpartisipasi.

Upaya APMCSTA yang mengarah pada pembentukan APSCO sejalan dan sekaligus merupakan implementasi dari prinsip-prinsip dan kebijakan dasar China dalam kerja sama internasional keantariksaan. Lebih lanjut, dengan memperhatikan bidang/area kerja sama prioritas China, pembentukan APSCO jelas merupakan prioritas pertama dari bidang/area kerja sama tersebut. Dari kesemuanya ini dapat dikatakan bahwa pembentukan APSCO mempunyai arti yang sangat penting bagi China.

Begitu besarnya arti penting APSCO ini bagi China dapat dilihat dari upaya China untuk memperoleh dukungan, antara lain melalui AP-MCSTA, ESCAP dan PBB serta pendekatan terhadap negara-negara secara individu baik di region Asia-Pasifik maupun di region lainnya. Tentu saja keseluruhan upaya ini selain telah memerlukan pemikiran dan konsep matang yang telah diimplementasikan secara sistematis dan terarah, juga telah menghabiskan dana dari China yang tidak sedikit jumlahnya. Sebagaimana diketahui melalui AP-MCSTA telah dilakukan berbagai upaya, antara lain (i) *Asia Pasifik Conference on Multilateral Cooperation in Space Technology and Application* sebanyak 7 kali di China dan negara lain dengan pendanaan sebagian besar atau seluruhnya dari China, (ii) Proyek Pembuatan "*Small Multi-Mission Satellite (SMMS)*" dengan pendanaan paling sedikit 70% dari China, (iii) Pembentukan Sekretariat AP-MCSTA di Beijing pada tahun 2001 dan penyiapan proposal pembentukan APSCO serta pembahasannya di China dan negara lain (Asia-Pasifik) dengan biaya untuk penyelenggaraan dan peserta seluruhnya atau sebagian besar ditanggung oleh China, dan (iv) Pelatihan (short training courses) dalam berbagai sektor keantariksaan.

Dengan demikian pembentukan APSCO yang bersifat multilateral jelas akan menjadi obat penawar bagi China dalam ketidakberhasilannya sebagai "host – country" bagi CSSTAP – *Affiliated to the United Nations*. Bahkan tidak sekedar hanya sebagai obat penawar, karena APSCO secara substansial dan politis akan jauh lebih besar dari CSSTEAP dimana India menjadi tuan rumahnya.

Kerjasama multilateral sendiri pada umumnya memiliki definisi sederhana yaitu dapat dilihat pada segi jumlah pihak yang terlibat, dimana terdapat kordinasi hubungan antara tiga atau lebih negara dan dilakukan didalam bentuk institusi multilateral. Sebagaimana dinyatakan oleh John Ruggie:

"multilateralism is an institutional form which coordinates relations among three or more states on the basis of 'generalized' principles of conduct ... without regard to the particularistic interests of the parties or the strategic exigencies that may exist in any specific occurrence"

Sedangkan secara normatif prinsip institusi multilateral dapat dimungkinkan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berpartisipasi didalamnya. Karena prinsip normatif dari institusi multilateral adalah meliputi, sebagai berikut:

Pertama, bahwa seluruh pihak yang terlibat memiliki partisipasi yang sederajat. *Kedua*, asas non-diskriminasi bahwa manfaat yang diterima oleh satu negara harus dapat di rasakan juga untuk semua negara yang terlibat. *Ketiga*, asas timbal balik atau resiprokal. China seperti yang dilakukan oleh Negara lain, selama kepentingan nasional fundamentalnya terjamin maka Beijing dalam kerangka multilateral akan menerapkan kebijakan luar negeri yang menggabungkan antara retorika dan kenyataan. Ini merupakan kombinasi perilaku internasional China yang kaku dan fleksibel dalam kerangka kepentingan nasionalnya. Sebagaimana dinyatakan oleh Quansheng Zhao:

to understand Chinese multilateralism is what can be called the rhetorical and substantive of Chinese foreign policy. This leads to a combination of rigidity and flexibility in Chinese international behaviors. As long as fundamental national interests can be secured, Beijing has been willing to be more flexible with regard to how certain issues should be handled.

Dengan demikian maka keinginan yang kuat dari China untuk menjalankan inisiatif-inisiatif di bidang keantariksaan dalam bentuk memajukan kerjasama multilateral tersebut menjadi strategi China untuk menunjukkan bahwa China ingin sekali memperluas *sphere of influence* (SOI) nya dengan berpikir global, seperti yang dijelaskan oleh Samuel Kim dalam suatu studinya tentang perilaku internasional China :

..... that the degree of Chinese acceptance of and compliance with norms, principles, and rules may be a function of the extent to which the so-called "global learning," which induces "global thinking," is actually taking place.

4. ANALISIS

4.1. Soft Power dalam Multilateral

Kekuatan lunak atau dikenal dengan *soft power* berada pada urutan terakhir dari tataran kekuatan yang sering digunakan oleh setiap Negara dalam memperjuangkan dan memenuhi kepentingan nasionalnya. Dalam prakteknya politik luar negeri suatu Negara tidak akan terlepas dari tiga tataran kekuatan, yaitu tataran atas adalah kekuatan militer (*hard power*), tataran menengah adalah kekuatan ekonomi (*economic power*), dan tataran bawah adalah kekuatan lunak (*soft power*). Penggunaan dari ketiga kekuatan merupakan upaya suatu Negara untuk menunjukkan kemampuan kepada Negara lain baik itu bersifat mengungguli atau mempengaruhi. Dalam konteks penggunaan kekuatan lunak, sebuah Negara dipastikan memiliki keinginan untuk menciptakan pengaruh, baik di sebuah Negara maupun kawasan tertentu dengan harapan Negara itu akan melakukan apa yang menjadi kepentingan dari Negara yang ingin membangun pengaruh.

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional di kawasan Asia Tenggara sulit menghindar dari keharusan untuk mencermati dan mengikuti perkembangan yang terjadi di kawasan Asia Pasifik. Selain itu Indonesia juga membutuhkan strategi untuk mendapatkan apa yang diinginkan dari Negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Tujuan itu dicapai tidak dengan menerapkan kekuatan keras (*hard power*), tetapi kekuatan lunak (*soft power*), yang menurut Joseph S. Nye akan memberi prospek yang lebih besar bagi keberhasilan sebuah misi. Asumsi dasarnya adalah dengan menggunakan kekuatan lunak, Indonesia selain memperoleh simpati dari internasional juga manfaat berupa keuntungan politik, ekonomi, dan strategis, khususnya dari Negara-negara yang menjadi pihak dalam kerjasama dan umumnya dari Negara-negara di kawasan. Dukungan dari Negara-negara tersebut sangat penting manakala Indonesia dihadapkan pada masalah-masalah dalam negeri yang secara langsung maupun tidak langsung akan memancing reaksi dari beberapa Negara tertentu di kawasan.

4.2. Arti Penting APSCO bagi Indonesia

Sebagai bentuk dari hubungan internasional di masa depan dan sejalan dengan globalisasi, kondisi-kondisi yang terkait dengan ketergantungan antara satu aktor dengan aktor lain dalam hubungan internasional akan semakin kuat. Akibat dari kondisi ketergantungan tersebut maka akan banyak interaksi dimana hubungan antar aktor diwarnai oleh persepsi yang dipengaruhi kondisi eksternal, sehingga masalah-masalah domestik dalam negeri sulit untuk tidak dipengaruhi dengan apa yang terjadi di internasional. Kondisi domestik yang semakin terbuka akan mendorong pada situasi yang rapuh atau kerapuhan (*vulnerability*) dimana batas negara mengalami gradasi yang tajam atau malah menjadi *borderless*. Dalam situasi yang demikian, Indonesia juga tidak akan terlepas dari pengaruh yang terjadi di eksternal khususnya dengan kehadiran negara-negara besar termasuk perilaku dan interaksi mereka di sekitar Indonesia.

Dari pendekatan geostrategi, Indonesia khususnya dan Negara-negara lainnya di kawasan, seharusnya berperan sebagai subyek yang mampu bermain sebagai kekuatan sentrifugal, dan mampu memperluas *sphere of influence* (SOI). Untuk itu Indonesia dapat melakukannya melalui kerjasama regional (*regionalisme*) di antara Negara-negara kawasan baik di tingkat subregional Asia Tenggara (ASEAN) maupun regional Asia Pasifik.

Dalam perspektif hubungan internasional dewasa ini penggunaan kekuatan lunak telah menjadi sebuah tren menarik, karena pendekatan ini sering kali digunakan oleh Negara-negara maju yang sebenarnya memiliki kekuatan riil seperti militer dan ekonomi. Oleh sebab itu politik luar negeri Indonesia kemudian memandang perlu untuk memilih dan memajukan kekuatan lunak tersebut, mengingat belum kuatnya kepemilikan atas kekuatan keras dan ekonomi. Pada tingkatan seperti itu bagi Indonesia untuk meningkatkan hubungan dengan kawasan secara keseluruhan sangat dimungkinkan untuk menggunakan kekuatan lunak yang menjadi pilihan rasional.

Sesuai dengan konvensinya APSCO dibentuk dengan keinginan untuk memperkuat kerjasama multilateral diantara Negara-negara di kawasan Asia Pasifik di bidang antariksa dengan mendasarkan aplikasi iptek antariksa untuk maksud damai. Kemudian salah satu tujuannya ada pada pasal 4 ayat 3 yaitu untuk memajukan kerjasama, pembangunan bersama, dan untuk berbagi kemajuan diantara Negara-negara anggota di bidang teknologi dan aplikasinya sesuai dengan penelitian iptek antariksa dengan potensi kerjasama kawasan. Potensi kegiatan keantariksaan kawasan Asia Pasifik sangat tinggi mengingat dinamika kawasan yang juga dipengaruhi oleh Negara-negara pemilik teknologi antariksa seperti China sendiri, India, Jepang, bahkan Amerika. Berbagai macam kepentingan dari Negara-negara pun kemudian mempengaruhi munculnya inisiatif kerjasama. Dimana kerjasama multilateral APSCO gagasan China itu kemudian menjadi semacam koordinasi multilateral kegiatan keantariksaan dan menjadi bentuk dari pengelolaan potensi keantariksaan regional yang sesungguhnya dapat membawa implikasi penting bagi Negara-negara di kawasan Asia Pasifik, dan dapat mengurangi jaminan biaya politik dengan membagi kontribusi untuk memperkuat komitmen pada nilai bersama seperti pendapat dari Joseph Nye :

..... Nye's argument illustrates how multilateral umbrellas reduce collateral political costs, how sharing contributes to strengthening commitment to common values.

Bagi Indonesia dengan mengedepankan kekuatan lunak dalam kerangka APSCO yang bersifat multilateral ini akan dapat membantu Indonesia mencari peluang dengan menjadikan APSCO sebagai sebuah "platform" internasional yang berguna tidak saja sebagai alat untuk pengakuan internasional tetapi juga dapat digunakan untuk mengejar kepentingan nasional.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Bahwa keterlibatan Indonesia dalam keanggotaan pada organisasi internasional baik bilateral maupun multilateral itu harus memberikan manfaat bagi Indonesia. Dalam memenuhi kemanfaatan dari keanggotaan tersebut telah diatur dengan Keppres No. 64 tahun 1999, Pasal 3. Dimana secara singkat disebutkan bahwa keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional harus mempertimbangkan beberapa aspek yang salah satunya adalah aspek politik.

Manfaat dari aspek politik kerjasama kawasan di bidang keantariksaan APSCO yang bersifat multilateral ini adalah tidak terlepas dari karakteristik dari multilateral. Dimana Organisasi ini dapat dijadikan peluang untuk melakukan pendekatan multilateral dalam konteks pelaksanaan kekuatan lunak atau *soft power*, karena potensi dari kerjasama multilateral kawasan keantariksaan ini dapat digunakan untuk membangun jaringan diplomatik untuk kepentingan yang lebih luas.

5.2. Saran

Untuk mencapai tujuan nasional dalam mengembangkan kemampuan keantariksaan Indonesia, maka Indonesia perlu untuk melakukan kerjasama khususnya yang bersifat multilateral seperti APSCO. Karena dengan masuk dalam keanggotaan APSCO tidak saja dapat membuka jaringan dengan banyak Negara dalam pengembangan keantariksaan Indonesia, tetapi yang lebih penting adalah Indonesia akan dapat menunjukkan kemampuan di arena internasional dengan kekuatan lunak yang dimiliki. Selanjutnya dengan mengikuti kerjasama APSCO yang menjadi sebuah platform internasional akan dapat dimanfaatkan oleh Indonesia untuk mencari pengakuan Internasional dan mengejar kepentingan nasional yang di wujudkan dengan pembangunan berbasis keantariksaan

DAFTAR RUJUKAN

Abdul Rivai Ras. *Konflik Laut Cina Selatan Dan Ketahanan Regional Asia-Pasifik, Sudut Pandang Indonesia*. Yayasan Abdi Persada Siporennu Indonesia (APSINDO) dan Mabes TNI AL, Jakarta, Oktober, 2001.

Anak Agung Banyu Perwita. *Pengantar Hubungan Internasional*. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006.

AP-MCSTA Mechanism in Retrospect and its Institutionalzation, Beijing, 2006.

Bantarto Bandoro. *Aspek Soft Power dalam hubungan Indonesia-Pasifik Selatan*. Analisis CSIS Vol.36, No.4 Desember 2007.

- Buku Putih Pertahanan Indonesia. Departemen Pertahanan Republik Indonesia. 2008.
- David Shambaugh. *"The Rise of China and Asia's New Dynamics,"* dalam David Shambaugh, ed., *Power Shift: China and Asia's New Dynamics*. Berkeley: University of California Press, 2005.
- Edi Sugardo. *Geopolitik Aspects of Indonesia*. Pengkajian Ketahanan Nasional. Pengkajian Ketahanan Nasional. Pascasarjana Universitas Indonesia. 1999.
- Edy Prasetyono. *Masalah-Masalah Bidang Pertahanan dan Keamanan*. CSIS. Jakarta.
- Hans J. Morgenthau. *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*. Politik Antar Bangsa, terjemahan Yayasan Obor Indonesia. Edisi Keenam. Jakarta. 1990.
- I Wibowo & Syamsul Hadi. *Merangkul Cina, Hubungan Indonesia-Cina Pasca-Soeharto*. PT. Gramedi Pustaka Utama. Jakarta. 2009.
- Institute for Defense Security and Peace Studies. *Keamanan Nasional*. Jakarta. Indonesia. 2008.
- Information Office of the State Council (China). *White Paper on China's Space Activities*. 22 November 2000.
- Information Office of the State Council of the People's Republic of China, *China's Space Activities in 2006*.
- John Ruggie Gerard.. *Multilateralism: The Anatomy of an Institution*. *International Organization* 46 (3): 1992.
- Joseph S. Nye, *The Paradox of American Power. Why the World's only Superpower Can't Go It Alone* . 2003.
- Jing-dong Yuan. *Asia-Pacific security: china's conditional multilateralism and great power entente*. January. 2000.
- Karl von Clausewitz. *War, Politics and Power*. S. Indiana, Regency, Gateway Inc. 1962.
- K.J. Holsti. *Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis*. Bandung. Bina Cipta. 1992.
- Kazuto Suzuki. *Envolving Asian Perspectives on Space Security*. Washington. 2008.
- May Rudy Teuku. *Studi Strategis Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*. PT. Refika Aditama. Bandung. 2002.

- May Rudy Teuku. *Teori, Etika dan Kebijakan Hubungan Internasional*. Angkasa. Bandung. 1992.
- Multilateralism . International Encyclopedia of the Social Sciences. 2008
- Quansheng Zhao. "*Patterns and Choices of Chinese Foreign Policy*,". Asian Affairs. Vol. 20. No. 1. 1993.
- R.M. Sunardi. *Geostrategi Indonesia, Pengkajian Katahanan Nasional*. Pascasarjana Universitas Indonesia. 1999.
- Republika 20 Agustus 2005.
- Sofyan Wanandi. *Indonesia dan Tantangan Ekonomi Global*. CSIS. 2003.
- Sinar Harapan. Manuver China Mengimbangi AS, Alman Helvas Ali, 30 Mei 2007.
- Theodore A. Coulombis & James H. Wolfe. *Pengantar Hubungan Internasional Keadilan dan Powe*. Prentice-Hall Inc. New York. 1986.
- Timbul Siahaan. *PEMIKIRAN TENTANG KEBIJAKAN PERTAHANAN INDONESIA 2020*. Puslitbang Strahan Balitbang Dephan.
- Tempo Online. *Indonesia Sound Out Defence Cooperation with China*, 18 Agustus 2008.
- The Stanford Daily. James Hohmann. "*Foreign Policy As Three Dimensional*". 15 Februari 2006.
- Undang-Undang No. 37 tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri.
- <http://www.apmcsta.org/> *Turkey Signs the APSCO Convention in Beijing*, APMCSTA, Beijing, 2006
- <http://www.indonesianembassy-china.org/id/relation.html>
- <http://www.tniad.mil.id/1artikel>. Prof. DR. Muladi, SH Gubernur Lemhanas RI, *satu dasa warsa reformasi tni dan pandangan tantangan kedepan*, 05 February 2008 16:49:02 WIB
- <http://www.tnial.mil.id/Majalah/Cakrawala/ArtikelCakrawala/Mencari> strategi pertahanan bagi-indonesia.
- <http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/> Masalah Keamanan Internasional, bantarto bandoro. bantarto bandoro, *masalah-masalah keamanan internasional abad 21*, Bali 14-18 Juli 2003.